

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah hudud*, *jarimah qisâs/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>1</sup> *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>2</sup> *Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>3</sup>

*Jarimah hudud* adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu :zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).<sup>4</sup> Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa *jarimah* zina merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd*.

---

<sup>1</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

<sup>2</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

<sup>3</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm . 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Elisabeth Lukas, seorang logoterapis kondang, sebagaimana dikutip oleh Hanna Djumhana Bastaman mengatakan:

"Salah satu prestasi penting dari proses modernisasi di dunia Barat, yakni melepaskan diri dari berbagai belenggu tradisi yang serba menghambat, sekaligus berhasil meraih kebebasan (*freedom*) dalam hampir semua bidang kehidupan. Di antaranya, yaitu *pertama*, kebebasan seks dan peluang untuk melakukannya ternyata menjadikan fungsi hubungan seks bukan sebagai ungkapan cinta kasih melainkan sebagai tuntutan dan keharusan untuk berhasil meraih puncak kenikmatan; *kedua*, makin sering terjadi gangguan fungsi seksual pada pria dan wanita dewasa".<sup>5</sup>

Pernyataan di atas menjadi indikator bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan seks, dan penyimpangan seks berkembang dalam bentuk perzinaan, padahal dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.<sup>6</sup> Namun dengan adanya perzinaan maka seks menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Atas dasar itu, semua agama langit mengharamkan dan memerangi perzinaan. Terakhir adalah agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Yang demikian itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.<sup>7</sup> Maha Besar Allah Swt yang mengatakan dalam firman-Nya,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk." (Al-Isra: 32).<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam, Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 192.

<sup>6</sup>Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004, hlm. 2.

<sup>7</sup>Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986, hlm. 134.

<sup>8</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 429.

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman *hadd* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Sabiq bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya.<sup>10</sup> Karena itu Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ (رواه مسلم)<sup>11</sup>

Artinya: "telah mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Yahya al-Tamimy dari Husyaim dari Masyur dari al-Hasan dari Khitton bin Abdillah al-Raqasyi dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: "Rasulallah Saw bersabda: "Berpeganglah padaku, berpeganglah padaku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan untuk mereka. Wanita perawan yang berzina hukumannya ialah dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun". (HR. Muslim).

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور: 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400.

<sup>11</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, 1981, hlm. 115.

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).<sup>12</sup>

Mengacu pada uraian keterangan di atas, dalam hukum pidana Islam, ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*.

1. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam.
2. Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu 1) dera seratus kali, dan 2) pengasingan selama satu tahun.

Dalam KUHP lama, perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang diancam dengan pidana adalah hanya untuk laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan, sedangkan untuk laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan tidak diancam pidana.

Akan tetapi dalam konsep KUHP Tahun 2008, dan Tahun 2012, laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan, dan yang tidak dalam ikatan perkawinan dapat diancam pidana. Hanya saja sifat deliknya masih delik aduan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 483 KUHP Tentang Zina (Rancangan konsep KUHP Tahun 2008).

#### Pasal 483 Tentang Zina

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

---

<sup>12</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op. cit*, hlm. 543.

- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Rancangan penjelasan konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa Pasal 483 mengatur mengenai tindak pidana zina, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Rumusan tentang zina dalam Pasal 483 rancangan konsep KUHP 2008 sama dengan rumusan Pasal 483 rancangan konsep KUHP 2012. Jadi sedikit pun tidak ada perbedaan. Pasal 483 konsep KUHP 2012 menegaskan:

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Rancangan penjelasan konsep KUHP Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pasal 483 mengatur mengenai tindak pidana zina, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Yang menjadi masalah mengapa dalam konsep KUHP 2012, delik perzinaan hanya dikelompokkan sebagai delik aduan? Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perzinaan itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarimah-jarimah*. Kelompok *jarimah hudud* ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.

Berpijak pada masalah di atas, bagaimana tindak pidana perzinaan dalam pasal 483 KUHP ditinjau dari hukum pidana Islam. Bagaimana sebaiknya merumuskan delik perzinaan dalam Pasal 483 KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 tentang Zina*

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,<sup>13</sup> maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tindak pidana zina dalam Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana zina dalam Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012?

---

<sup>13</sup>Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993, hlm. 112

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui konsep tindak pidana zina dalam Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana zina dalam Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012.

### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung penelitian ini. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan data pendukung, di antaranya:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh M. Irkhammudin Sholeh (NIM: 2199205 IAIN Walisongo) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.B/2000 PN.PML tentang Tindak Pidana Perzinaan Secara Berlanjut*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa terhadap kejahatan perzinahan/kesusilaan, ancaman hukuman berdasarkan KUHP tidak sampai seberat dan sebijak Hukum Pidana Islam. Bandingkan dengan apa yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281, 282, 283, dan pasal 284, 285 KUHP, serta lainnya. Dalam pasal tersebut, tidak terlihat adanya ancaman berupa pendidikan seperti tersirat dalam hukum pidana Islam, baik bagi yang bersangkutan, maupun masyarakat. Kejahatan perzinaan tidak dapat diberikan pemaafan, seperti halnya kejahatan lain. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah/2:

178. Namun, bukan mustahil dapat pengampunan illahi sebagaimana terbukti tidak mau menerima pengakuan, kecuali memberi kesempatan bertobat atau bukan.<sup>14</sup>

Penelitian pertama berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian pertama hanya menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.B/2000 PN.PML tentang Tindak Pidana Perzinaan Secara Berlanjut. Penelitian pertama lebih banyak menggunakan teori-teori gabungan tindak pidana (*concursum*).

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Sayidatul Fadlilah (NIM: 3100238 IAIN Walisongo) dengan judul *Larangan perzinaan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlak Anak*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghair muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M. Irkhamudin Sholeh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.B/2000 PN.PML tentang Tindak Pidana Perzinaan Secara Berlanjut*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

<sup>15</sup> Sayidatul Fadlilah, *Larangan perzinaan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlak Anak*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.



Penelitian kedua berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian kedua hanya menganalisis implikasinya terhadap pendidikan akhlak anak, dan sama sekali tidak membahas menurut hukum positif versi konsep RUUKUHP tahun 2012.

*Ketiga*, penelitian yang disusun oleh Choirun Nidzar Alqodari (NIM: 2102247 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa menurut Syafi'i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian penulis sebagai berikut;

- 1) Penelitian di atas menggunakan studi tokoh yaitu Imam Syafi'i dengan mengkaji Kitab *al-Umm*
- 2) Yang dibahas adalah masalah kedudukan hukum isolasi atau pengasingan terhadap pelaku zina, dan sama sekali tidak membahas Pasal 284 KUHP versi lama dengan Pasal 483 Rancangan KUHP tahun 2012. Sedangkan penelitian penulis hendak mengkaji persoalan perzinahan dari sudut Pasal KUHP versi lama dengan versi Rancangan terbaru tahun 2012.

---

<sup>16</sup> Choirun Nidzar Alqodari, *Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

*Keempat*, penelitian yang disusun oleh Abdul Wahab (NIM: 2103094 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Pendapat Imam Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukum Rajam bagi Kafir Dzimmy*. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i bahwa pelaku zina kafir dzimmy dapat dikenakan hukum rajam. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak mensyaratkan Islam, karena dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa orang kafir dzimmy yang melakukan zina bisa dikenakan hukum rajam. Menurut penulis, jika kafir dzimmy yang melakukan perzinaan tidak dikenakan hukum rajam, sedangkan perbuatannya bisa menularkan penyakit, maka perbuatan zina kafir dzimmy akan meresahkan umat Islam dan posisi umat Islam sangat dirugikan. Perzinaan jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi moral dan akhlaq yang pada akhirnya bisa merusak generasi umat Islam. Dengan demikian terasa adil apabila kafir dzimmy dikenakan hukum rajam. Dalam hubungannya dengan hukum rajam bagi pelaku zina kafir dzimmy, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an, yaitu surat al-Maidah 48, serta hadis riwayat dari Abu ath-Thahir dari Abdullah bin Wahb, Hadis riwayat dari al-Hakam bin Musa Abu Shaleh dari Syu'ab bin Ishak, dan hadis riwayat dari Harun bin Abdillah dari Hajaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu Imam Syafi'i menggunakan qiyas.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis sebagai berikut;

- 1) Penelitian di atas menggunakan studi tokoh yaitu Imam Syafi'i dengan mengkaji Kitab *al-Umm*
- 2) Penelitian di atas hanya membahas pelaku perzinaan yang dikategorikan kafir zimmy, sedangkan penelitian penulis tidak membahas kafir zimmy melainkan membahas pelaku zina terlepas apakah dia kafir zimmy atau bukan

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab, *Pendapat Imam Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukum Rajam bagi Kafir Dzimmy*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007.

- 3) Penelitian penulis membahas KUHP nasional yang menjadi hukum positif, dan tidak membahas pendapat Imam Syafi'i.

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis mempunyai nilai kebaharuan dan tidak mungkin dapat melakukan duplikasi atau plagiat terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian penulis memiliki nilai originalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder (dalam hal ini buku-buku). Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, yaitu Pasal 483 Konsep KUHP Tahun 2012, penjelasannya, serta pendapat para pakar hukum pidana.
- b. Sumber Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai*; Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*; Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*; Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*; Soedarto, "Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas-Hukum Diponegoro*; *Hukum dan Hukum Pidana*; *Hukum Pidana I*.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, website, foto, dan dokumen-dokumen lain.

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,<sup>18</sup> penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung (angka statistik).<sup>19</sup> Dalam hal ini hendak diuraikan perzinaan Pasal 483 tentang Zina dalam rancangan konsep KUHP Tahun 2012. Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang lahirnya KUHP lama warisan kolonial Belanda dan lahirnya konsep KUHP tahun 2012.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

---

<sup>18</sup>Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

<sup>19</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 134. Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269.

Bab kedua tinjauan umum tentang zina yang meliputi (pengertian zina, klasifikasi zina, unsur-unsur zina. Hukuman yang meliputi (pengertian dan dasar-dasar penjatuhan hukuman, tujuan hukuman, macam-macam hukuman dan pelaksanaannya).

Bab ketiga tentang perzinaan rancangan konsep KUHP Tahun 2012 yang meliputi konsep KUHP Tahun 2012 (pembaruan dalam RUU KUHP Nasional, dasar pemidanaan dan penjatuhan pidana). Perzinaan dalam Pasal 483 Konsep KUHP Tahun 2012.

Bab keempat berisi analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perzinaan dalam konsep KUHP tahun 2012, meliputi konsep pidana perzinaan dalam Pasal 483 RUU Konsep KUHP Tahun 2012, pandangan hukum pidana Islam terhadap perzinaan dalam Pasal 483 RUU Konsep KUHP Tahun 2012.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.